



**PEMERINTAH KABUPATEN
BANGKALAN**



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH**

Find Us !



@bpkad.bangkalan



(031) 3098579



Jl. Soekarno Hatta No. 35, Mlajah, Bangkalan

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan BPKAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2023. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja BPKAD Tahun 2021 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting BPKAD, evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD Tahun lalu dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra BPKAD Tahun 2018-2023.

Tersusunnya Rencana Kerja Perubahan BPKAD Tahun 2023 ini, disamping sebagai Dokumen Rencana Kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan BPKAD sebagai perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Bangkalan, Agustus 2023

**KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN**



ABDUL AZIZ, S.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19740729 200312 1 006

DAFTAR ISI

	HAL
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019 dan Capaian Renstra	9
Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	43
3.1 Program dan Kegiatan.....	43
Bab V Penutup.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih riil.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis antara lain :

1. Menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. Sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.
3. Renja PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program dan kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.
4. Dan Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh

mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

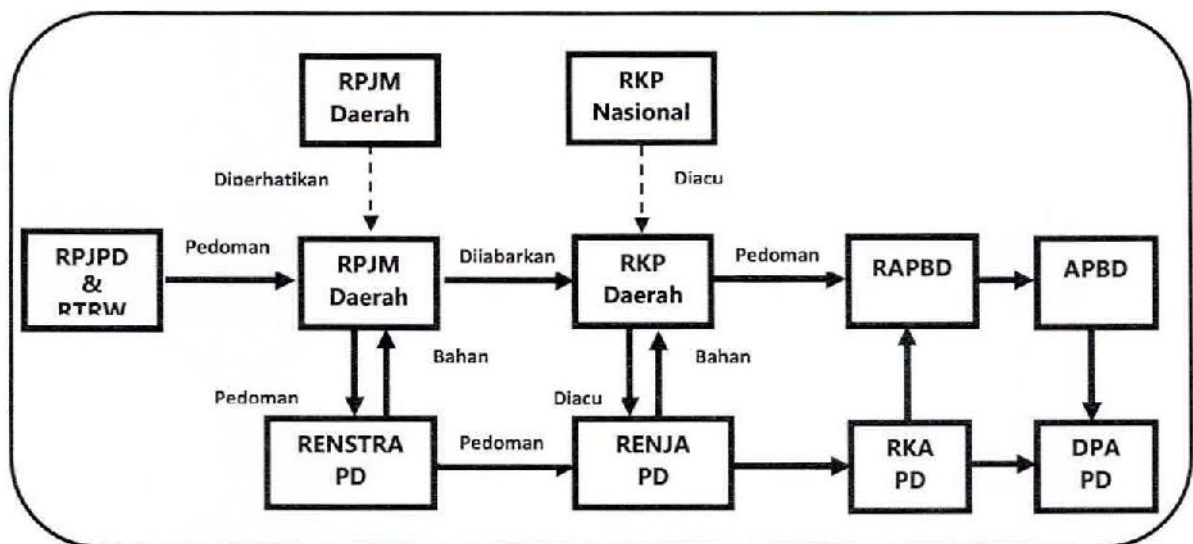
Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; terdiri dari enam tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir dan penetapan. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Keterkaitan Renja BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar 1 :

Gambar 1 Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan



RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 - 2025 merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi acuan penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 - 2023 merupakan tahap ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 - 2025. RPJMD tahap ketiga

melanjutkan visi pembangunan jangka panjang daerah yaitu mewujudkan Kabupaten Bangkalan Sebagai Kabupaten Industri, Perdagangan dan Jasa yang Tangguh Menuju Terciptanya Masyarakat Madani. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 - 2023 disusun melalui tahapan perencanaan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan.

RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 - 2023 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tahun 2018 - 2023 untuk jangka waktu 5 tahun sesuai tugas dan tupoksi BPKAD dan lebih didetailkan lagi melalui Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setiap tahun mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023. Selanjutnya Renja PD menjadi acuan untuk penyusunan RKA - PD (Rencana Kerja Anggaran PD). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan didasarkan pada Landasan Hukum sebagaimana berikut :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
- d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- h. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5587) Perubahan terakhir Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015
- i. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan dan penelaahan rencana strategis kementerian/lembaga (renstra k/l) 2015-2019

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
- n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupate Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 1/D);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D);

- r. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 1/E, tambahan lembaran daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 76);
- s. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- t. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 7/E);
- u. Surat Edaran Bupati Nomor 903/416/433.201/2022 tentang Pedoman penyempurnaan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2023
- v. Perbup Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Bangkalan Tahun 2023

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan, antara lain :

- a. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan, perencanaan, target capaian dengan pelaksanaannya;
- b. Meningkatkan peran partisipasi aktif pemangku kepentingan dan stake holder dalam proses penyusunan program kegiatan dan perencanaan anggaran;
- c. Menyelaraskan program, kegiatan dengan anggaran;
- d. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya;

- e. Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah yang terukur sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah.

Sedangkan, tujuannya adalah :

- a. Sinkronisasi dan menjabarkan Rencana Strategis - Perangkat Daerah kedalam program dan kegiatan pada 1 (satu) tahun anggaran;
- b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD;
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas perencanaan program kegiatan dan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja BPKAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut di atas dibagi per Bab. sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab 2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab 3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

- 3.1 Program dan Kegiatan Tahun 2023

Bab 4 Penutup

BAB II

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Dari hasil evaluasi dimaksud sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi penyusunan rancangan APBD, Penetapan APBD, Pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Penatausahaan APBD, Pengelolaan Aset dan Akuntansi Keuangan Daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah dan pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi pembangunan di Bidang Pemerintahan dan otonomi daerah, pada Tahun 2022 di titik beratkan pada program utama pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah meliputi 3 (tiga) Program dan 13 (dua belas) Kegiatan dengan 62 (enam puluh dua) Sub Kegiatan antara lain sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Dari program-program diatas, realisasi Belanja Operasi BPKAD pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 51.036.018.219, Belanja Modal BPKAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 694.675.291, Belanja Tidak Terduga BPKAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.139.767.191 dan Belanja Transfer BPKAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 435.623.479.100 atau 98,49% dengan rincian program dan kegiatan antara lain :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pagu Program ini sebesar Rp. 52.191.232.683 dan terealisasi sebesar Rp. 48.077.864.689 atau 92,12% yang diterjemahkan melalui kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 108.767.000 dan terealisasi sebesar Rp. 93.508.800 atau 85,97% dan diterjemahkan kedalam sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 21.780.150 dan terealisasi sebesar Rp. 18.806.500 atau 86,35%
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.733.050 dan terealisasi sebesar Rp. 21.883.000 atau 88,48%

- c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.806.250 dan terealisasi sebesar Rp. 22.084.000 atau 89,03%
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.898.600 dan terealisasi sebesar Rp. 2.766.500 atau 95,44%
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.252.450 dan terealisasi sebesar Rp. 2.395.400 atau 73,65%
 - f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18.530.000 dan terealisasi sebesar Rp. 17.738.400 atau 95,73%
 - g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.766.500 dan terealisasi sebesar Rp. 7.835.000 atau 61,37%
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 46.626.336.083 dan terealisasi sebesar Rp. 43.831.431.568 atau 94,01% dan diterjemahkan kedalam sub kegiatan sebagai berikut :
- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp. 46.566.026.507 dan terealisasi sebesar Rp. 43.774.314.318 atau 94,00%
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 39.733.626 dan terealisasi sebesar Rp. 37.866.750 atau 95,30%
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.575.950 dan terealisasi sebesar Rp. 19.250.500 atau 93,56%

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 19.842.750 dan terealisasi sebesar Rp. 19.403.550 atau 97,79% dan diterjemahkan kedalam sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.645.950 dan terealisasi sebesar Rp. 8.565.850 atau 99,07%
 - b) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.196.800 dan terealisasi sebesar Rp. 10.837.700 atau 96,79%
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 95.150.000 dan terealisasi sebesar Rp. 92.972.000 atau 97,71% dan diterjemahkan kedalam Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.150.000 dan terealisasi sebesar Rp. 27.972.000 atau 92,78%
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 65.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 65.000.000 atau 100%
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 565.280.700 dan terealisasi sebesar Rp. 547.329.272 atau 96,82% dan diterjemahkan kedalam Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.043.650 dan terealisasi sebesar Rp. 10.451.000 atau 94,63%

- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 107.893.850 dan terealisasi sebesar Rp. 99.747.450 atau 92,45%
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 41.988.000 dan terealisasi sebesar Rp. 39.200.000 atau 93,36%
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 129.034.000 dan terealisasi sebesar Rp. 124.596.800 atau 96,56%
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.480.000 dan terealisasi sebesar Rp. 6.300.000 atau 97,22%
 - f) Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 17.368.800 atau 99,25%
 - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 226.341.200 dan terealisasi sebesar Rp. 225.022.422 atau 99,42%
 - h) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 24.642.800 atau 98,57%
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 167.226.050 dan terealisasi sebesar Rp. 143.641.125 atau 85,90% dan diterjemahkan kedalam Sub Kegiatan sebagai berikut :
- a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 125.032.050 dan terealisasi sebesar Rp. 105.263.200 atau 84,19%

- b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 42.194.000 dan terealisasi sebesar Rp. 38.377.925 atau 90,96%
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 4.153.765.100 dan terealisasi sebesar Rp. 3.014.517.333 atau 72,57% dan diterjemahkan kedalam Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.885.100 dan terealisasi sebesar Rp. 2.103.525 atau 26,68%
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 254.850.000 dan terealisasi sebesar Rp. 225.883.716 atau 88,63%
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.891.030.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.786.530.092 atau 71,61%
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 122.365.000 dan terealisasi sebesar Rp. 335.061.041 atau 73,66% dan diterjemahkan kedalam Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 122.365.000 dan terealisasi sebesar Rp. 90.125.424 atau 73,65%
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp.

128.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 59.489.317 atau 46,76%

- c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 114.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 114.135.800 atau 99,68%
- d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 90.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 70.950.500 atau 78,83%

B. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Pagu Program ini sebesar Rp. 443.236.546.038 dan terealisasi sebesar Rp. 440.047.925.117 atau 99,28% yang diterjemahkan melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 1.881.656.725 dan terealisasi sebesar Rp. 1.792.288.400 atau 95,25% yang diterjemahkan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 52.284.000 dan terealisasi sebesar Rp. 45.114.500 atau 86,29%
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 52.699.500 dan terealisasi sebesar Rp. 50.134.900 atau 95,13%
 - c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.375.000 dan terealisasi sebesar Rp. 11.995.200 atau 96,93%
 - d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.375.000 dan terealisasi sebesar Rp. 11.995.200 atau 96,93%

- e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 35.375.000 dan terealisasi sebesar Rp. 35.066.500 atau 99,13%
 - f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 35.375.000 dan terealisasi sebesar Rp. 28.955.000 atau 81,85%
 - g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 890.516.000 dan terealisasi sebesar Rp. 847.277.900 atau 95,14%
 - h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 587.585.225 dan terealisasi sebesar Rp. 563.044.700 atau 95,82%
 - i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 153.600.000 dan terealisasi sebesar Rp. 153.087.000 atau 99,67%
 - j. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 41.057.000 dan terealisasi sebesar Rp. 38.462.500 atau 93,68%
 - k. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.415.000 dan terealisasi sebesar Rp. 7.155.000 atau 85,03%
2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 357.422.800 dan terealisasi sebesar Rp. 281.850.736 atau 78,86% yang diterjemahkan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.029.900 dan terealisasi sebesar Rp. 13.029.900 atau 100,00%
- b. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.590.200 dan terealisasi sebesar Rp. 14.590.200 atau 100,00%
- c. Penatausahaan Pembiayaan Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.595.100 dan terealisasi sebesar Rp. 15.545.100 atau 99,68%
- d. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.385.500 dan terealisasi sebesar Rp. 23.601.500 atau 96,78%
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga(PFK) , dengan pagu anggaran sebesar Rp. 106.066.850 dan terealisasi sebesar Rp. 94.407.786 atau 89,01%
- f. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.272.300 dan terealisasi sebesar Rp. 9.587.300 atau 58,92%
- g. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait, dengan pagu anggaran sebesar Rp.

17.214.250 dan terealisasi sebesar Rp. 15.914.250 atau 92,45%

- h. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 150.268.700 dan terealisasi sebesar Rp. 95.174.700 atau 63,34%
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 328.940.800 dan terealisasi sebesar Rp. 210.539.690 atau 64,01% yang diterjemahkan melalui kegiatan sebagai berikut :
- a. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 27.423.000 dan terealisasi sebesar Rp. 20.623.762 atau 75,21%
 - b. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 141.467.850 dan terealisasi sebesar Rp. 95.247.050 atau 67,33%
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 160.049.950 dan terealisasi sebesar Rp. 94.668.878 atau 59,15%
4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 440.668.525.713 dan

teralisasi sebesar Rp. 437.763.246.291 atau 99,34% yang diterjemahkan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 430.308.225.700 dan teralisasi sebesar Rp. 428.900.081.100 atau 99,67%
- b. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.551.220.013 dan teralisasi sebesar Rp. 2.139.767.191 atau 60,25%
- c. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.809.080.000 dan teralisasi sebesar Rp. 6.723.398.000 atau 98,74%

C. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pagu Program ini sebesar Rp. 1.560.354.575 dan teralisasi sebesar Rp. 1.368.149.995 atau 87,68% yang diterjemahkan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 1.560.354.575 dan teralisasi sebesar Rp. 1.368.149.995 atau 87,68% yang diterjemahkan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Standar Harga, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 276.712.350 dan teralisasi sebesar Rp. 271.004.600 atau 97,94%
 - b. Inventarisasi Barang Milik Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 27.530.650 dan teralisasi sebesar Rp. 26.920.100 atau 97,78%
 - c. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 891.254.275 dan teralisasi sebesar Rp. 742.391.016 atau 83,30%

- d. Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 44.652.450 dan terealisasi sebesar Rp. 42.872.250 atau 96,61%
- e. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 218.582.550 dan terealisasi sebesar Rp. 184.332.779 atau 85,50%
- f. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 104.622.300 dan terealisasi sebesar Rp. 100.629.250 atau 46,68%

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
Pemutakhiran sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmen 050-3708 Tahun 2020										
5.02	KEUANGAN									
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	76,76%	76,76%
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, pengangan dan evaluasi PD yang tersusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	86,57%	86,57%
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	4 Dok	12 Dok	100,00%
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	6 Dok	100,00%
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	6 Dok	100,00%
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	6 Dok	100,00%

		Penyusunan Dokumen DPA-SKPD								
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6 Dok		2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	4 Dok	66,67%
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Dok	1 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	3 Dok	8 Dok	114,29%
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	100%	8 Laporan	16 Laporan	66,67%
5.02.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan PD terlayani tepat waktu	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.02.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang dibayarkan tunjangan dan gajinya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
5.02.01.02.02.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	6 Dok	100,00%
5.02.01.02.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	4 Dok	12 Dok	100,00%
5.02.01.02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada PD yang teradministrasi dgn baik	100%		100%	100%	100%	100%	78%	78%
5.02.01.02.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dok		1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	2 Dok	66,67%
5.02.01.02.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42 Dok	14 Dok	5 Dok	5 Dok	100%	14 Dok	33 Dok	78,57%
5.02.01.02.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dok							

5.02.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani	100%		100%	100%	100%	100%	26%	26%
5.02.01.02.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	210 Buah		70 Buah	63 Buah	90%	-	63 Buah	30,00%
5.02.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	210 Buah		-	-	-	-	-	
5.02.01.02.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Laporan	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	2 Laporan	66,67%
5.02.01.02.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Laporan		-	-	-		-	
5.02.01.02.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	140 Orang		-	-	-		-	
5.02.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	210 Orang		18 Orang	15 Orang	83%	2 Orang	17 Orang	8,10%
5.02.01.02.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140 Orang		-	-	-	67 Orang	67 Orang	47,86%
5.02.01.02.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	140 Orang		-	-				
5.02.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi umum tepat waktu/sesuai standard/ketentuan	100%		100%	100%	100%	100%	93%	93%
5.02.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	150 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	100%	50 Unit	150 Unit	100,00%
5.02.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100%	1 Jenis	3 Jenis	100,00%
5.02.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	6 Jenis	100,00%
5.02.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100%	1 Jenis	3 Jenis	100,00%

5.02.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100%	1 Jenis	3 Jenis	100,00%
5.02.01.02.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	100,00%
5.02.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Kali	20 Kali	100 Kali	100 Kali	100%	100 Kali	220 Kali	88,00%
5.02.01.02.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Laporan		-	-	-	6 Laporan	6 Laporan	100,00%
5.02.01.02.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	100%		2 Sistem	66,67%
5.02.01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Persentase BMD yang terpenuhi	100%		100%	100%	100%	100%	31%	31%
5.02.01.02.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		10 Unit	10 Unit	100%	-	10 Unit	50,00%
5.02.01.02.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	48 Unit		-	-	-	10 Unit	10 Unit	20,83%
5.02.01.02.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Jenis					-	-	
5.02.01.02.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		2 Unit	2 Unit	100%	-	2 Unit	50,00%
5.02.01.02.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit					-	-	
5.02.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.02.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100%	1 Jenis	3 Jenis	100,00%
5.02.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Jenis	3 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	3 Jenis	8 Jenis	100,00%

5.02.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	6 Unit	100,00%
5.02.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.02.01.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	42 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit	100%	14 Unit	42 Unit	100,00%
5.02.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	100%	51 Unit	51 Unit	100,00%
5.02.01.02.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit							
5.02.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100%	100 Unit	300 Unit	100,00%
5.02.01.02.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Jenis							
5.02.01.02.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Jenis							
5.02.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	100,00%
5.02.01.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Jenis							
5.02.01.02.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Jenis							
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terpenuhinya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	86,81%	86,81%
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terpenuhinya rencana anggaran daerah yang tersusun secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%		100%	100%	100%	100%	91,67%	91,67%

5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	6 Dok	100,00%
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	6 Dok	100,00%
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	3 Kali		1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	2 Kali	66,67%
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	3 Kali		1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	2 Kali	66,67%
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	100,00%
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	3 Kali		1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	2 Kali	66,67%
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	6 Dok	100,00%
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	6 Dok	100,00%
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	100,00%
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	100,00%
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	100,00%
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	3 Dok	1 Dok	-	-	-	1 Dok	2 Dok	66,67%
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%		100%	100%	100%	100%	82,22%	82,22%
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	6 Dok	100,00%

5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	6 Dok		2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	4 Dok	66,67%
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	6 Dok		2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	4 Dok	66,67%
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	6 Dok	100,00%
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	100,00%
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	3 Dok		1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	2 Dok	66,67%
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	6 Dok		2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	4 Dok	66,67%

5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	6 Dok	100,00%
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%		100%	100%	100%	100%	73,33%	73,33%
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Dok		-	-	-	-	-	-
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	3 Dok		-	-	-	1 Dok	1 Dok	33,33%
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	100,00%
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	100,00%
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	100,00%
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3 Dok		-	-	-	-	-	-

5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3 Dok		-	-		-	-	
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	3 Dok		-	-		1 Dok	1 Dok	33,33%
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Dok		-	-		-	-	
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	421 Orang		-	-		-	-	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terpenuhinya Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan mendesak yang tersalurkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Prosentase Dana Darurat dan Mendesak yang tersalurkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Prosentase Dana bagi Hasil yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terpenuhinya OPD yang Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	45,18%	45,18%
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya OPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	45,18%	45,18%
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	5 Dok	1 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	5 Dok	100,00%
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	3 Dok		1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	2 Dok	66,67%
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik	14 Dok & 568 Sertifikat	4 Dok	5 Dok & 284 Sertifikat	5 Dok & 49 Sertifikat	65%	5 Dok	14 Dok	100,00%

		Daerah								
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	42 Dok	14 Dok	14 Dok	14 Dok	100%	14 Dok	42 Dok	100,00%
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	12 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	4 Dok	12 Dok	100,00%
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1179 Orang	164 Orang	164 Orang	164 Orang	100%	164 Orang	492 Orang	41,73%
Jumlah				-	-	-	-	-	-	

BAB III

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

3.1 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Bangkalan, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Suatu Program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi,

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcome maupun impact sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan pada BPKAD Kabupaten Bangkalan sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Bangkalan	100%	35.399.071.805			100%	37.573.641.069
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD yang tersusun tepat waktu	Bangkalan	100%	75.852.000			100%	92.400.000
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bangkalan	2 Dok	10.400.000	DAUM		2 Dok	12.400.000
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bangkalan	1 Dok	16.000.000	DAUM		1 Dok	17.000.000
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bangkalan	1 Dok	16.000.000	DAUM		1 Dok	17.000.000
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Bangkalan	1 Dok	2.309.000	DAUM		1 Dok	7.000.000
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Bangkalan	1 Dok	3.239.000	DAUM		1 Dok	7.000.000
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bangkalan	6 Laporan	12.952.000	DAUM		6 Laporan	15.000.000

5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bangkalan	8 Laporan	14.952.000	DAUM		8 Laporan	17.000.000
5.02.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan PD terlayani tepat waktu	Bangkalan	100%	29.780.276.213	DAUM		100%	32.705.963.319
5.02.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bangkalan	51 Orang/bulan	29.751.221.213	DAUM		51 Orang/bulan	32.681.963.319
5.02.01.02.02.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bangkalan	2 Laporan	15.000.000	DAUM		2 Laporan	12.000.000
5.02.01.02.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bangkalan	4 Laporan	14.055.000	DAUM		4 Laporan	12.000.000
5.02.01.02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada PD yang teradministrasi dgn baik	Bangkalan	100%	10.000.000	DAUM		100%	14.000.000
5.02.01.02.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bangkalan	1 Dok	5.000.000	DAUM		1 Dok	7.000.000
5.02.01.02.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bangkalan	14 Laporan	5.000.000	DAUM		14 Laporan	7.000.000
5.02.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani	Bangkalan	100%	10.000.000	DAUM		100%	25.000.000
5.02.01.02.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bangkalan	1 Dok	-	DAUM		1 Dok	7.000.000
5.02.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bangkalan	2 org	-	DAUM		2 org	11.000.000
5.02.01.02.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bangkalan	67 org	10.000.000	DAUM		67 org	7.000.000
5.02.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi umum tepat waktu/sesuai	Bangkalan	100%		DAUM		100%	418.813.650

		standard/ketentuan			385.193.650				
5.02.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bangkalan	4 Paket	10.000.000	DAUM		4 Paket	13.000.000
5.02.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bangkalan	18 Paket	77.116.250	DAUM		18 Paket	80.116.250
5.02.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bangkalan	1 Paket	30.750.000	DAUM		1 Paket	35.500.000
5.02.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bangkalan	1 Paket	128.960.400	DAUM		1 Paket	130.960.400
5.02.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bangkalan	1 Dokumen	6.300.000	DAUM		1 Dok	8.300.000
5.02.01.02.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bangkalan	4 Laporan	11.550.000	DAUM		4 Laporan	11.550.000
5.02.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bangkalan	4 Laporan	120.517.000	DAUM		4 Laporan	135.827.000
5.02.01.02.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bangkalan	2 Dok	-	DAUM		2 Dok	3.560.000
5.02.01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	Bangkalan	100%	108.547.300	DAUM		100%	131.714.100
5.02.01.02.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Bangkalan	10 Unit	108.547.300	DAUM		10 Unit	131.714.100
5.02.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi	Bangkalan	100%	4.233.628.733	DAUM		100%	3.555.470.000
5.02.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bangkalan	4 Laporan	5.020.000	DAUM		4 Laporan	7.020.000
5.02.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bangkalan	4 Laporan	269.850.000	DAUM		4 Laporan	269.850.000

5.02.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bangkalan	4 Laporan	3.958.758.733	DAUM		4 Laporan	3.278.600.000
5.02.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Bangkalan	100%	513.229.620	DAUM		100%	12.400.000
5.02.01.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bangkalan	22 Unit	111.000.000	DAUM		22 Unit	17.000.000
5.02.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bangkalan	51 Unit	82.750.000	DAUM		51 Unit	17.000.000
5.02.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bangkalan	167 Unit	98.030.000	DAUM		167 Unit	7.000.000
5.02.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bangkalan	1 Unit	221.449.620	DAUM		1 Unit	7.000.000
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terpenuhinya Pengelolaan Keuangan Daerah	Bangkalan	100%	446.063.370.869	DAUM		100%	419.755.137.207
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terpenuhinya rencana anggaran daerah yang tersusun secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	Bangkalan	100%	1.494.600.000	DAUM		100%	1.964.000.000
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Bangkalan	2 Dok	43.639.000	DAUM		2 Dok	53.139.000
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Bangkalan	2 Dok	43.639.000	DAUM		2 Dok	53.139.000
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Bangkalan	1 Dok	11.250.000	DAUM		1 Dok	17.750.000
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Bangkalan	1 Dok	11.250.000	DAUM		1 Dok	17.750.000
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Bangkalan	1 Dok	27.500.000	DAUM		1 Dok	38.915.000

5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Bangkalan	1 Dok	25.625.000	DAUM		1 Dok	38.915.000
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Bangkalan	2 Dok	531.410.000	DAUM		2 Dok	596.303.000
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Bangkalan	2 Dok	523.739.000	DAUM		2 Dok	572.166.000
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Bangkalan	1 Dok	236.345.000	DAUM		1 Dok	522.690.000
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Bangkalan	1 Dok	26.338.000	DAUM		1 Dok	37.368.000
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Bangkalan	1 Dok	9.115.000	DAUM		1 Dok	10.115.000
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Bangkalan	1 Dok	4.750.000	DAUM		1 Dok	5.750.000
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Bangkalan	100%	101.282.125	DAUM		100%	149.788.750
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Bangkalan	2 Dok	6.875.250	DAUM		2 Dok	13.354.650
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Bangkalan	2 Dok	7.650.000	DAUM		2 Dok	12.550.000
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Bangkalan	2 Dok	425.250	DAUM		2 Dok	1.063.550
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Bangkalan	2 Dok	10.471.025	DAUM		2 Dok	26.115.250

5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Bangkalan	1 Laporan	250.000	DAUM		1 Laporan	1.054.100
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Bangkalan	1 Dok	380.100	DAUM		1 Dok	1.049.900
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Bangkalan	2 Dok	9.050.500	DAUM		2 Dok	13.520.450
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Bangkalan	2 Dok	66.180.000	DAUM		2 Dok	81.080.850
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Bangkalan	100%	215.378.450	DAUM		100%	312.683.500
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Bangkalan	1 Dok	-	DAUM		1 Dok	26.900.000
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Bangkalan	1 Laporan	24.711.750	DAUM		1 Laporan	36.015.000
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Bangkalan	1 Laporan	94.427.400	DAUM		1 Laporan	107.816.200

5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Bangkalan	1 Dok	88.127.800	DAUM		1 Dok	129.154.900
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Bangkalan	1 Dok	8.111.500	DAUM		1 Dok	12.797.400
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terpenuhinya Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan mendesak yang tersalurkan	Bangkalan	100%	444.951.690.432	DAUM		100%	417.328.664.957
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Prosentase Penyaluran Bantuan Keuangan yang tersalurkan	Bangkalan	4 Laporan	434.470.460.700	DAUM		4 Laporan	406.666.376.000
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Prosentase Dana Darurat dan Mendesak yang tersalurkan	Bangkalan	2 Laporan	2.805.600.612	DAUM		2 Laporan	3.000.000.000
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Prosentase Dana bagi Hasil yang terpenuhi	Bangkalan	4 Laporan	7.675.629.120	DAUM		4 Laporan	7.662.288.957
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terpenuhinya OPD yang Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bangkalan	100%	541.899.136	DAUM		100%	1.005.120.194
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya OPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	Bangkalan	100%	541.899.136	DAUM		100%	940.120.194
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Bangkalan	2 Dok	225.848.300	DAUM		2 Dok	273.442.750
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Bangkalan	14 Laporan	-	DAUM		14 Laporan	18.507.500
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Bangkalan	4 Dok	254.910.636	DAUM		4 Dok	520.120.194

5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bangkalan	14 Laporan	12.440.000	DAUM		14 Laporan	28.000.000
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Bangkalan	4 Laporan	48.700.200	DAUM		4 Laporan	77.000.000
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bangkalan	164 Org	-	DAUM		164 Org	23.049.750
Jumlah					482.421.577.658,50	Jumlah			458.268.898.470

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Strategis BPKAD Tahun 2018-2023, berdasarkan RPJMD Kabupaten Bangkalan 2018-2023, sehingga tahun ini merupakan awal perencanaan target kinerja.

Target kinerja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang dicantumkan dalam RPJMD berkaitan dengan Tingkat Kinerja yang ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program PD secara umum dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Penetapan Renja PD yang berada dipertengahan tahun anggaran memiliki rentang waktu yg cukup lama dengan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hal ini tentunya memberikan peluang adanya pergeseran atau perubahan rencana yang akan dilakukan pada proses penganggaran dalam RAPBD. Hal tersebut dapat disebabkan oleh factor eksternal dan internal di Kabupaten Bangkalan, antara lain :

- a. Perubahan kebijakan atau Peraturan dan Perundangan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- b. Perkembangan dan dinamika yang terjadi pada masyarakat;
- c. Ketersediaan anggaran yang tersedia;
- d. Dan beberapa hal lain yang mempengaruhi kebijakan penganggaran.

Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan rencana kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan dan kepada semua pihak yang telah

membantu dalam penyusunan Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Bangkalan tahun 2023, kami sampaikan banyak terima kasih semoga dokumen rencana kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2023 bermanfaat sebagaimana mestinya

Bangkalan, Agustus 2023

KEPALA BPKAD

KABUPATEN BANGKALAN



ABDUL AZIZ, S.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19740729 200312 1 006